



**H. BAMBANG PU DJIONO, SH
BUPATI GROBOGAN**



**H. ICEK BASKORO, SH
WAKIL BUPATI GROBOGAN**

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) kepada Pemerintah, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepada DPRD, serta Informasi LPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) disampaikan kepada masyarakat.

Informasi LPPD yang disampaikan kepada masyarakat merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang memuat :

- (1) Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- (2) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, penyusunan Informasi LPPD ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2009, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan dan/atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2009 dimaksud.

Tanggapan dan/atau saran itu oleh pemerintah daerah selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program kerja dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tanggapan dan/atau saran itu disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah informasi LPPD disampaikan.

A. DASAR HUKUM

- (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
- (3) PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 dan Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Surat MENDAGRI tanggal 8 Mei 2007 Nomor 188.32.04/558-DV perihal PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di antara $110^{\circ}15'$ BT – $111^{\circ}25'$ BT dan 7° LS - $7^{\circ}30'$ LS. Dengan kondisi tanah, sebagian berupa daerah pengunungan kapur dan perbukitan, serta di bagian tengah berupa dataran. Terletak di antara 2 (dua) pegunungan yaitu Kendeng Utara dan Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Sragen, Semarang dan Kabupaten Ngawi.

Luas wilayah Kabupaten Grobogan $1.975,86 \text{ km}^2$. Secara administrasi terdiri dari 19 Kecamatan, 280 Desa/Kelurahan dan 1.451 Dusun. Jumlah penduduk pada Tahun 2009 sebanyak 1.404.770 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 695.690 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 709,080 jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 711 jiwa/Km^2 dan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,74%. Potensi unggulan daerah berupa Padi, Jagung, Buah Melon, Industri Genteng Press, Batu Kapur dan Furniture.

Tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan jumlah penduduk usia di atas 5 tahun, tamatan SD atau sederajat menduduki peringkat yang tertinggi yaitu 508.783, kemudian diikuti tidak atau belum pernah sekolah serta tidak atau belum tamat SD sebanyak 421.973 jiwa, SLTP atau sederajat sebesar 224.201 jiwa, tamatan SMU atau sederajat 119.279 jiwa, dan Diploma, Si, S2 dan S3 sebesar 27.640 jiwa.

Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2009 tercatat sebanyak 462.228 jiwa atau 32% dari total penduduk 1.404.770 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 40% pada Tahun 2007, dan 33% pada Tahun 2008.

Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku. Pada Tahun 2009 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan mengalami pertumbuhan positif, hal ini ditunjukkan dari Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada angka 4,83 dan pertumbuhan

PDRB atas dasar harga berlaku pada angka 10,75. Apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB perkapita, PDRB perkapita atas dasar Harga Konstan pada Tahun 2009 sebesar Rp. 2.208.454,- menurun sebesar 19,7% dari tahun sebelumnya, sedangkan atas dasar harga berlaku sebesar Rp.4.102.612,- naik sebesar 7%.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemerataan pendapatan masyarakat, pada umumnya dilihat dari indikator nilai Indeks Gini Ratio dan Proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah sebagaimana Kriteria Bank Dunia.

Berdasarkan kedua indikator distribusi pendapatan masyarakat tersebut, dari Tahun 2006 s/d 2009 Kabupaten Grobogan berada pada kategori tidak timpang (*low inequality*). Hal ini dibuktikan dengan angka Indeks Gini Ratio dari Tahun 2006 s/d Tahun 2009 masih di bawah batas indeks yang ditetapkan yaitu sebesar 0,35.

Demikian juga apabila dilihat dari indikator Proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah, dimana pada Tahun 2009 tercatat sebesar 26,6 %; angka ini mempunyai arti bahwa 40% penduduk berpendapatan terendah masih menikmati bagian pendapatan sekitar 26,6%. Hal ini jauh di atas batas ketimpangan yaitu 17%, maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Grobogan berdasarkan kriteria Bank Dunia dikategorikan rendah.

C. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan penyusunan teknis APBD didasarkan pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.

Penetapan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, sedangkan perubahan APBD dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan berdasarkan prinsip Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas, Anggaran Berimbang dan Dinamis, Disiplin, Transparansi, serta Akuntabilitas.

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 mencapai 106% dari target pendapatan sebesar Rp.796.532.437.850,- Sumbangan terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 85%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 9,1% dari total Pendapatan Daerah.

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Grobogan TA. 2009

No	PENDAPATAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.867.671.575	76.776.418.078	137
1	Pajak Daerah	9.518.676.860	11.169.301.732	117
2	Retribusi Daerah	35.021.307.690	45.107.615.394	128
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.836.857.156	2.838.319.156	100
4	Lain-lain PAD yang sah	8.490.829.869	17.661.181.796	208
B	DANA PERIMBANGAN	692.080.609.519	713.129.581.551	103
1	Pos Bagi Hasil Pajak / Bagi hasil Bukan Pajak	50.381.443.519	53.918.290.551	107
2	DAU	614.891.166.000	614.891.166.000	100
3	DAK	26.808.000.000	26.808.000.000	100
4	Dana Tunjangan Pendidikan	0	17.512.125.000	
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	48.584.156.756	52.971.292.647	109
1	Dana Darurat	0	0	0
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	36.360.856.756	40.747.992.647	112
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0
4	Bantuan Keuangan dari Propinsi	12.223.300.000	12.233.300.000	100
	JUMLAH (A+B+C)	796.532.437.850	842.877.292.276	105

Sumber : DPPKAD Kab. Grobogan Th. 2009, belum diaudit BPK.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Serapan atau realisasi belanja mencapai Rp. 813.428.520.587,- atau 97,97% dari total anggaran sebesar Rp. 830.319.056.053,- yang berarti terdapat sisa lebih sebesar Rp. 16.890.535.466,-

Serapan belanja tidak langsung mencapai Rp. 555.030.254.594,- atau 103,81% dari total anggaran sebesar Rp. 534.641.327.698,-. Adapun serapan belanja langsung mencapai Rp. 258.398.265.993,- atau 87,39% dari total anggaran sebesar Rp. 295.677.728.355,-.

Target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan TA. 2009

No	BELANJA DAERAH	Anggaran	Realisasi	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	534.641.327.698	555.030.254.594	103,81
1	Belanja Pegawai	456.812.845.198	486.570.139.631	106,51
2	Belanja Bunga	5.123.689.000	3.955.243.628	77,20
3	Belanja Subsidi	-	-	0,00
4	Belanja Hibah	23.115.457.500	22.447.065.000	97,11
5	Belanja Bantuan Sosial	20.735.686.000	15.730.235.859	75,86
6	Belanja Bagi Hasil	741.000.000	740.832.000	99,98
7	Belanja Bantuan Keuangan	25.612.650.000	23.683.296.421	92,47
8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	1.903.442.055	76,14
B	BELANJA LANGSUNG	295.677.728.355	258.398.265.993	87,39
1	Belanja Pegawai	46.270.403.600	42.677.274.217	92,23
2	Belanja Barang dan Jasa	126.943.265.555	117.738.943.556	92,75
3	Belanja Modal	122.464.059.200	97.540.176.520	79,65
	JUMLAH (A+B)	830.319.056.053	813.428.520.587	97,97

Sumber : DPPKAD Kab. Grobogan Th. 2009, belum diaudit BPK.

Penyerapan belanja langsung yang hanya mencapai 87,39% disebabkan tertundanya sebagian pembayaran biaya pemeliharaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak untuk jenis pemeliharaan yang melebihi akhir Tahun Anggaran 2009, dan baru dibayarkan Tahun 2010.

Disamping itu, karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran, yang disebabkan gagal dalam proses lelang, tidak cukup waktu, atau secara teknis tidak dimungkinkan dilaksanakan.

3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan mencapai 85% dari target sebesar Rp. 111.535.756.474,-. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai 93% dari target sebesar Rp. 77.749.138.271,-

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Grobogan TA. 2009

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Penerimaan Pembiayaan	111.535.756.474	94.596.167.535	85
B	Pengeluaran Pembiayaan	77.749.138.271	72.642.285.976	93
C	Pembiayaan Netto	33.786.618.203	21.953.881.559	65

Sumber : DPPKAD Kab. Grobogan Th. 2009, belum diaudit BPK.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan visi jangka panjang 20 tahun Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka visi jangka menengah untuk 5 tahun sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang maju, mandiri, berbadan sehat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertumpu pada keunggulan di bidang pertanian, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”

Berdasarkan visi untuk 5 tahun tersebut, dan berdasarkan misi jangka panjang 20 tahun, maka **misi untuk 5 tahun mendatang** adalah :

1. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pengelolaan dan pemasarannya untuk mendukung pengembangan perdagangan dan industri kecil guna meningkatkan perekonomian daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, melalui penciptaan sistem perijinan yang mudah, murah dan cepat guna mendukung peningkatan investasi dan penanaman modal.
3. Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah.
4. Meningkatkan peran koperasi, agar benar-benar menjadi soko guru perekonomian daerah, regional dan nasional
5. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur), serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan olah raga.
7. Menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi dan penegakan hukum.
8. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya kaum wanita.
9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang.
10. Mengenal dan memberdayakan potensi PAD dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat perekonomian masyarakat.
11. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan.
12. Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
13. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.

B. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta tetap menjaga kestabilan harga dalam rangka meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009, dipedomani tujuh prinsip pengarusutamaan, yaitu :

1. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat
2. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.
3. Pengarusutamaan gender
4. Pengarusutamaan tata pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
5. Pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan serta daerah tertinggal.
6. Pelaksanaan otonomi daerah
7. Pelaksanaan padat karya

C. PRIORITAS DAERAH

1. Prioritas penanggulangan dan pengurangan penduduk miskin.

Prioritas yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan dan pengurangan penduduk miskin antara lain adalah :

- a. menurunkan jumlah penduduk kategori miskin.
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan utamanya yang menyangkut hajat hidup orang banyak (umum dan miskin).
- c. meningkatkan pengarusutamaan gender dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. meningkatkan akses informasi (jaringan pemasaran produk lokal) dan komunikasi masyarakat grass root (masyarakat rendah).
- e. meningkatkan berbagai jenis ketrampilan bagi penduduk miskin.
- f. meningkatkan manajemen pelatihan kelompok bagi pengembangan UKP (Usaha Kerja Produktif) bagi kelompok penduduk miskin.
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
- h. meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat miskin, sehingga akan meningkatkan ketrampilan dan sumber-sumber penghidupannya.
- i. Memberdayakan fakir miskin dan penyandang masalah sosial.
- j. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kemiskinan di lingkungannya dan perbaikan gizi buruk.

2. Prioritas penyediaan sarana dan prasarana umum daerah.

Prioritas penyediaan sarana dan prasarana umum meliputi aspek-aspek yang antara lain :

- a. meningkatkan kualitas jalan-jalan kabupaten;
- b. meningkatkan kualitas jembatan kabupaten;
- c. meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan normalisasi sungai-sungai alam yang mengalami pendangkalan;
- e. melakukan perawatan sarana dan prasarana irigasi;
- f. mengembangkan sarana irigasi pedesaan;
- g. mengembangkan penyediaan air bersih berbasis masyarakat melalui program AMPL dan PAMSIMAS.
- h. Meningkatkan manajemen pengelolaan pertanahan.
- i. Meningkatkan pengawasan bangunan serta pengaturan pemukiman sesuai RTRW.

3. Prioritas perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Prioritas yang yang perlu dilaksanakan dalam rangka perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran antara lain :

- a. meningkatkan layanan informasi pasar kerja (IPK).
- b. meningkatkan kualitas ketrampilan tenaga kerja.
- c. meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.
- d. meningkatkan ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.
- e. meningkatkan fasilitas terhadap AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara).
- f. memberikan sertifikasi atas penguasaan ketrampilan tertentu.
- g. memberikan kewirausahaan bagi penganggur.
- h. memperluas jaringan kerja sama penempatan tenaga kerja.
- i. memberikan sosialisasi syarat-syarat kerja.
- j. mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan.

4. Memantapkan pembangunan di bidang ekonomi, melalui pengelolaan produk unggulan dan andalan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh bidang pembangunan di bidang ekonomi daerah perlu di Prioritas, antara lain :

- a. **Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)** meliputi :
 - 1) meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UKM;
 - 2) meningkatkan akses koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan;

- 3) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap koperasi;
 - 4) meningkatkan kemitraan antar koperasi dan UKM maupun dengan badan usaha lainnya.
- b. **Bidang Perindustrian** antara lain sebagai berikut :
- 1) meningkatkan penerapan iptek dalam perindustrian daerah;
 - 2) meningkatkan kemampuan SDM perindustrian daerah;
 - 3) meningkatkan kinerja industri kecil menengah (IKM);
 - 4) meningkatkan jaringan kerjasama antara IKM dengan Swasta;
 - 5) mengembangkan pemanfaatan energi minyak jarak;
 - 6) mengembangkan sentra-sentra industri potensial daerah.
- c. **Bidang energi dan sumber daya mineral** antara lain sebagai berikut :
- 1) mengoptimalkan upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral;
 - 2) mengoptimalkan upaya reklamasi lahan pasca penambangan untuk menekan kerusakan lingkungan;
 - 3) mendorong pertambangan rakyat agar memiliki ijin;
 - 4) mengoptimalkan regulasi pengelolaan ABT (air bawah tanah);
 - 5) meningkatkan kualitas SDM pengelola pertambangan rakyat;
 - 6) meningkatkan rasio elektrifikasi di Kab.Grobogan;
 - 7) mengoptimalkan perkembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif.
- d. **Bidang Pariwisata** antara lain sebagai berikut:
- 1) mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata daerah;
 - 2) meningkatkan daya tarik potensi pariwisata daerah;
 - 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang pariwisata;
 - 4) mengoptimalkan kegiatan promosi pariwisata daerah;
 - 5) meningkatkan kualitas dan kuantitas pemandu wisata daerah;
 - 6) meningkatkan dukungan dunia usaha untuk mendukung kegiatan wisata daerah;
 - 7) mengoptimalkan kerjasama antar daerah dalam mengembangkan pariwisata.
- e. **Bidang Perhubungan** antara lain sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - 2) mengoptimalkan pemasangan rambu-rambu jalan yang terpasang di jalan-jalan utama Kabupaten Grobogan;

- 3) meningkatkan koordinasi antara pelaku usaha transportasi untuk menekan timbulnya konflik kepentingan;
 - 4) melakukan pembukaan jalur baru layanan transportasi angkutan umum;
 - 5) meningkatkan penegakan disiplin tertib berlalu lintas ;
 - 6) meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum terhadap para penumpang.
- f. **Bidang Pertanian dan Perkebunan**, antara lain sebagai berikut :
- 1) meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) meningkatkan adopsi teknologi di bidang pertanian dan perkebunan;
 - 3) menumbuhkembangkan kelembagaan tani;
 - 4) meningkatkan aksesibilitas petani pada sumber teknologi, permodalan dan pemasaran;
 - 5) mengendalikan serangan hama dan ppenyakit sehingga tidak merugikan petani;
 - 6) meningkatkan mutu produksi pertanian agar harga jualnya menjadi meningkat pula;
 - 7) meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, serta keseimbangan gizi pada masyarakat;
 - 8) meningkatkan kesadaran masyarakat mengkonsumsi pangan non beras untuk mengurangi ketergantungan akan kebutuhan beras.
- g. **Bidang Perikanan** antara lain sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani ikan;
 - 2) meningkatkan produksi ikan;
 - 3) menanggulangi ancaman hama dan penyakit perikanan;
 - 4) mengembangkan industri rumah tangga pengolahan ikan sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
 - 5) meningkatkan daya saing produksi pertanian dan perikanan
 - 6) meningkatkan industrialisasi pedesaan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang mengarah keaneka pangan pokok.
- h. **Bidang kehutanan** antara lain sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kelembagaan dalam pembangunan hutan;
 - 2) menekan tingkat kerusakan hutan;
 - 3) mengoptimalkan pemanfaatan hutan dan hasil hutan rakyat sebagai bahan baku industri ;
 - 4) mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat dalam mendukung pembangunan kehutanan;
 - 5) meningkatkan kesejahteraan petani hutan sosial dan hutan kemasyarakatan;

- 6) pengembangan kawasan agropolitan kehutanan;
- 7) meningkatkan sentra-sentra produksi kehutanan;
- 8) meningkatkan teknologi tepat guna di lingkungan kehutanan.

i. **Bidang Penanaman Modal** antara lain meliputi :

- 1) meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Grobogan;
- 2) mengoptimalkan kegiatan promosi investasi dalam rangka menawarkan produk-produk unggulan, andalan dan potensial;
- 3) meningkatkan fasilitas kerjasama pengembangan investasi, baik antar pengusaha, maupun pengusaha dengan pemerintah
- 4) meningkatkan kinerja pelayanan satu atap (*one stop service*);
- 5) meningkatkan penyediaan data dan informasi potensi investasi.
- 6) mengembangkan BUMD yang bersifat Badan Layanan Umum Daerah guna mendinamisasi masyarakat.

j. **Bidang Perdagangan** antara lain sebagai berikut :

- 1) meningkatkan kelancaran sistem distribusi barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat;
- 2) mencegah peningkatan harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya dan hari-hari besar keagamaan;
- 3) mengoptimalkan kerjasama kemitraan dalam perdagangan;
- 4) mengoptimalkan penyebaran dan informasi pasar kepada masyarakat;
- 5) meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan ekspor dan impor;
- 6) mengembangkan sentra-sentra industri potensial daerah;
- 7) meningkatkan pengaturan dan pembinaan serta penyediaan tempat usaha bagi pedagang kaki lima (PKL) sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan.

Prioritas pembangunan daerah dalam rangka memantapkan pembangunan bidang pendidikan antara lain adalah :

- a. menuntaskan wajar dikdas 9 tahun;
- b. menuntaskan buta aksara;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- d. meningkatkan kualitas pendidikan;
- e. meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme serta kesejahteraan tenaga pendidik;
- f. memberdayakan lembaga pendidikan, baik formal maupun informal dalam pembentukan kualitas SDM berwawasan IPTEK dan IMTAQ;
- g. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;

- h. meningkatkan kinerja, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan;
- i. meningkatkan minat baca masyarakat;
- j. meningkatkan kualitas perpustakaan daerah.

6. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan.

Prioritas pembangunan daerah dalam rangka memantapkan pembangunan bidang kesehatan antara lain adalah :

- a. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat serta perbekalan kesehatan masyarakat;
- k. memberdayakan masyarakat menumbuhkan perilaku hidup sehat;
- l. meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan masyarakat;
- m. meningkatkan SDM tenaga kesehatan;
- n. meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakat
- o. meningkatkan kesehatan lingkungan;
- p. meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pasien miskin;
- q. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat;
- r. meningkatkan penanganan wabah penyakit;
- s. meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

7. Prioritas penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Upaya yang dilakukan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan supremasi hukum dan HAM baik di masyarakat maupun di aparat pemerintah.
- b. meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat.
- c. meningkatkan pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- d. meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- e. mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab.
- f. mengoptimalkan pengawasan internal pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
- g. mengoptimalkan dan menindaklanjuti penanganan aduan masyarakat yang didukung data yang benar dan bertanggung jawab.
- h. peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara legislatif, yudikatif dan pengawasan yang bertanggung jawab.
- i. peningkatan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien.
- j. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa terhadap pelaksanaan keuangan daerah untuk menghindari adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

- k. Perlu meningkatkan optimalisasi segenap sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- l. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung media komunikasi dan informasi daerah.
- m. mengoptimalkan penyebarluasan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, program, maupun hasil pembangunan.
- n. meningkatkan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Grobogan.
- o. mengoptimalkan peran Lembaga Kehumasan.

III. URUSAN DESENTRALISASI

Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.677.728.355,- dan terealisasi sebesar Rp. 258.398.265.993,- atau 87,39% dengan uraian ringkas sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Dalam penyelenggaraan urusan wajib yang terdiri dari 26 urusan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 276.302.938.355,- dan terealisasi sebesar Rp. 240.291.307.795,- atau mencapai 86,97%. Adapun urusan wajib yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. URUSAN PENDIDIKAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada Tahun 2009 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.489.085.000,- dan terealisasi sebesar 24.075.937.329,- atau 94,46% diarahkan untuk mewujudkan tercapainya Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, meningkatkan kualitas lulusan pendidikan menengah, yang siap meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan siap bersaing dalam bursa kerja, Pendidikan non formal diutamakan bagi penduduk di luar usia sekolah yang belum tamat SD atau SMP atau masih buta aksara, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta kualitas layanan pendidikan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pengadaan APE luar 20 set, APE dalam 200 set, 1 RKB TK Negeri, penunjang operasional pelaksanaan kegiatan PAUD di 15 klp PAUD dan pembangunan 3 RKB TK/RA.
- (2) Rehab gedung SD/MI di 149 sekolah SD, pengembangan Sarpras di 5 SD-SMP satu atap, pengadaan bangunan ruang di 12 SD-SSN, pembuatan kisi-kisi UASBN SD/MI, Posko Ujian, Scan LJK UASBN, Pendaftaran Peserta UN/UASBN, Cetak Kartu Peserta Ujian, Monitoring UN/UASBN, Sewa Mobil/Kendaraan untuk pengiriman LJK ke Provinsidi 927 SD/MI, 171 SMP/MTs, 72 SMA/MA/SMK se-Kab. Grobogan, serta lomba bidang

studi/lomba mapel SD/MI yang diikuti siswa SD perwakilan 19 Kecamatan se-Kab. Grobogan dan pengadaan buku perpustakaan di 6 sekolah.

- (3) Rehab Gedung 2 SMA/SMK, Pembangunan RKB 5 SMA/SMK, Pengadaan Buku Penunjang Pelajaran/Referensi di 5 SMA/SMK, dan Pengadaan Alat Laboratorium Komputer di 2 SMA/SMK, Pengadaan 1 RKB RSBI SMKN 1 Purwodadi, lomba mapel SMP/SMA, lomba pidato Bahasa Indonesia SMP/SMA/SMK, lomba pidato bahasa jawa SMP/SMA/SMK, lomba perpustakaan SMP/SMA, lomba LSS SMP/SMA, lomba KIR SMP/SMA, lomba Sinopsis SMP/SMA, lomba Mapel SMK, lomba debat bahasa Inggris SMP, lomba debat bahasa Inggris SMA/SMK dan pengiriman ke tingkat provinsi.
- (4) Penuntasan Buta Aksara bagi penduduk usia 15-44 tahun penyandang buta aksara, buta angka dan buta bahasa, penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) melalui kegiatan paket A, B dan C, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar pendidikan non formal, termasuk pengurus TPQ dan Madin.
- (5) Diklat/penataran tenaga pendidik/anak didik, dan bantuan tugas belajar bagi guru dalam rangka penyetaraan guru.
- (6) Meningkatkan peran Dewan Pendidikan, Kompetisi Olah Raga dan Seni Pelajar, pemberian bantuan Kesra bagi guru Wiyata Bakti TK/RA dan SD/MI, Seleksi Calon Kepala Sekolah serta penyusunan data pokok pendidikan yang akuntabel.
- (7) Pengelolaan sekolah fillial dan sekolah satu atap, yaitu SMP Filial dan SD SMP Satu Atap, penunjang sarana prasarana pendidikan, bantuan operasional pendidikan untuk SD se-Kabupaten, penunjang pelaksanaan BOS untuk sekolah se-Kabupaten, bantuan operasional pendidikan SMP/MTs,SMA/MA/SMK se Kab. Grobogan.

2. URUSAN KESEHATAN

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 49.261.730.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 47.171.123.300.- atau 95,76% diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Penyediaan obat operasional Puskesmas, pengadaan bahan laborat, peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan RS.
- (2) Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Puskesmas rawat inap dan RS, pengembangan Laboratorium Puskesmas, Peningkatan Fungsi Polindes menjadi PKD (Poliklinik Kesehatan Desa), dan pembinaan Posyandu.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan obat dan makanan di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), BP/RB, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), penyedia kosmetika dan alat-alat kesehatan (Kosalkes),

Bahan Tambahan Makanan (BTM), toko penjual paket lebaran, paket natal, dan lain-lain.

- (4) Penyediaan Media Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Akselerasi Desa Siaga, Penyediaan Jasa Farmasi dan Jasa Pelayanan, dan Penyediaan Jasa Promosi.
- (5) Pembinaan Kesehatan Keluarga, serta penanggulangan gizi buruk di Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (6) Penyehatan Lingkungan Permukiman, berupa tersedianya sarana sanitasi untuk sekolah dasar dan masyarakat.
- (7) Pencegahan penyebaran penyakit menular, melalui pemberian Imunisasi kepada bayi, balita, anak-anak sekolah dasar dan wanita usia subur; Pemberantasan penyakit demam berdarah, Kusta, dan TBC, Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS)/HIV-AIDS, dan Pencegahan penyakit Avian Influenza atau Flu Burung, serta Tuberkulosis (TBC).
- (8) Perbaikan mutu pelayanan kesehatan, melalui kegiatan Akreditasi Puskesmas, dan penyusunan PERDA TARIF RSD R. Soedjati Purwodadi, pemutakhiran peralatan kedokteran, peralatan farmasi dan peralatan Laboratorium; serta meningkatkan kelengkapan peralatan/sarana prasarana rumah sakit.
- (9) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin melalui jasa penguburan pasien tidak mampu dan bantuan klaim pelayanan kesehatan.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum tahun anggaran 2009 lebih dititik beratkan pada penanganan jalan, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan-jalan yang dilalui jalur trayek angkutan. Target percepatan pembangunan infrastruktur ini adalah untuk meningkatkan lapis permukaan jalan dengan konstruksi beton bertulang tunggal dan Hotmix.

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum Tahun 2009, dialokasikan anggaran Rp. 85.012.219.300,- terealisasi Rp.63.866.026.598,- atau 75,13% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, serta Program Pamsimas.

Capaian kegiatan Urusan Pekerjaan Umum antara lain sebagai berikut:

- (1) Peningkatan jalan sepanjang ± 45,173 km (meliputi : Beton Full Rigid = 21,77 km, Beton Setapak = 5,52 km, ATB = 3,33 km, Telford = 14,55 km), pembangunan jembatan 12 buah, Talud sepanjang 580 m, dan pembangunan saluran sepanjang 1488 m.
- (2) Pemeliharaan jalan beton setapak sepanjang 108 m, Rehab 2 buah jembatan gantung, 5 buah jembatan, 1 buah gorong-gorong, penanganan longsor sepanjang 30 m, serta pemeliharaan rutin jalan sebanyak 3 paket (wilayah barat, tengah dan timur).

- (3) Rehab saluran induk sepanjang 1,5 km, perbaikan saluran sekunder sepanjang 8,5 km, saluran tersier sepanjang 1,25 km, saluran pembawa sepanjang 400 m, talang air sebanyak 2 buah, pembuatan/ rehab bangunan air sebanyak 6 buah, serta kegiatan OP jaringan irigasi sepanjang 75 km dan bangunan air sebanyak 40 buah.
- (4) Pembuatan embung tipe C sebanyak 3 buah, perbaikan bendung sebanyak 5 buah dan saluran sepanjang 1,65 km.
- (5) Normalisasi sungai/saluran pembuang sepanjang 6,9 km di 5 lokasi, perbaikan longsoran tebing/ tanggul kali sepanjang 432 m di 5 lokasi, pembangunan saluran pembuang sepanjang 1 km, serta pembuatan 1 buah bendung dengan salurannya sepanjang 64 m.
- (6) Peningkatan/ pembangunan jalan desa sepanjang 53,59 km, meliputi : Beton Full Rigid ± 1,63 km, Beton setapak = 3,97 km, ATB = 1,34 km, Telford = 46,36 km, paving = 303 m), jembatan = 27 buah, talud sepanjang 2.007 m, saluran sepanjang 326 m dan oprit seluas 12 m².
- (7) Penataan jalan lingkungan sepanjang 2,75 km, saluran / drainase sepanjang 890 m, Trotoar sepanjang 507 m, Pembangunan Pasar Hortikultura dan rehab gedung wisuda.

4. URUSAN PERUMAHAN

Penyelenggaraan Urusan Perumahan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.658.632.250,- dan terealisasi sebesar Rp.4.349.081.600,- atau 93,36% diarahkan untuk menciptakan lingkungan sehat perumahan, Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran, Pengelolaan Areal Pemakaman. Dengan capaian kegiatan antara lain : Terlaksananya DAK bidang air minum dan sanitasi di 19 desa, pendampingan (Cost Sharing) PAMSIMAS di 15 desa, Pembuatan sumur geo listrik, peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran, pengadaan 1 unit kendaraan tangki air, dan rehab kendaraan tangki air dan pemadam kebakaran.

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang dialokasikan anggaran sebesar sebesar Rp. 368.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.347.386.817,- atau 94,19% diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan mengendalikan penggunaannya. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Peninjauan kembali perda tentang IMB, pembuatan Peraturan Bupati tentang Sempadan bangunan kota Purwodadi.
- (2) Revisi RDTRK Kota Purwodadi, Penyusunan RTR RPJM KTP2D Desa Kapung Kec. Tanggunharjo serta koordinasi penataan ruang.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.114.598.175,- dan terealisasi Rp. 3.849.693.658,- atau 93,56% diarahkan untuk penyediaan data/informasi sebagai bahan

perencanaan pembangunan, meningkatkan kegiatan pembangunan, upaya terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, perencanaan pembangunan bidang ekonomi, perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dan perencanaan pemanfaatan wilayah dan sumber daya alam, dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Penyusunan pra survey tahun 2010, Penyusunan Indikator Kinerja dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, Penyusunan Buku Sistem Informasi Profil Daerah berbasis kecamatan, Studi Jalan Poros Desa Kabupaten dan Penyusunan Buku Sistem Informasi Profil Daerah Kab. Grobogan.
- (2) Penyusunan Proposal dan Konsultasi Program Pembangunan Strategis yang diusulkan ke Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pelaksanaan Forum Perencanaan SKPD; Musrenbangkab 2009, Penyusunan Buku Evaluasi Tahunan Dana Perimbangan Tahun 2009, RPJM Bidang Keciaptakaryaan, Pembentukan dan revitalisasi kelompok pendamping lapangan, koordinasi pelaksanaan P2KP, Penyusunan LPPD, LKPJ, dan ILPPD Tahun 2008.
- (4) Pembinaan klaster, produk klaster dan display promosi, penyusunan Rencana Induk Perdagangan Kab. Grobogan, koordinasi Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah, Koordinasi Pengendalian PNPM di Kab. Grobogan, penguatan kelembagaan, pembuatan booklet dan kerja sama antar FEDEP, koordinasi perencanaan, sosialisasi dan pemantauan DBHCHT.
- (5) Koordinasi PAMSIMAS, pelaksanaan program PLAN dari Kec. Kedungjati, Tanggungharjo dan Karangrayung oleh tim koordinasi pelaksanaan program PLAN dan tim terkait pelaksanaan program PLAN, serta penyusunan dokumen IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kab. Grobogan, koordinasi pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) di seluruh Kab. Grobogan dan penyusunan rekomendasi telaah dan analisis SPM Pendidikan dan Kesehatan.
- (6) Penyusunan Review Masterplan Drainase Kota Purwodadi, penyusunan dokumen kreativitas dan inovasi teknologi dan riset mengenai penyebaran pengrajin rokok di Kab. Grobogan sebanyak 10 buku.

7. URUSAN PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.876.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.600.985.444,- atau 90,42% diarahkan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan darat, meningkatkan dan merawat prasarana dan fasilitas LLAJ, mewujudkan pelayanan angkutan mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan keamanan angkutan penumpang maupun angkutan barang, mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, serta mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Patroli Penertiban Lalu Lintas Jalan, Penyuluhan Kelalulintasan bagi 10 SMA/SMK, Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Penertiban Lalu Lintas di Kabupaten Grobogan di 4 ruas jalan dan pengamanan perlintasan kereta api pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru di 12 titik.
- (2) Pembangunan Ruang Tunggu Penumpang seluas 220 m², Pengerasan Landasan Sub Terminal Godong seluas 691 m² dan pembangunan smoking area di Terminal Induk Purwodadi seluas 24 m²; dan
- (3) Pemasangan Traffic Light dan CounterDown LED.

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup TA. 2009 dialokasikan anggaran Rp 3.597.843.450,- dan terealisasi Rp 3.504.059.459,- atau 97,39% yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan dengan mengembangkan paradigma menuju Kabupaten Grobogan yang bersih dan indah dengan melibatkan partisipasi publik, peningkatan pengelolaan pertamanan secara inovatif dan peningkatan sarana bermain bagi anak, mengupayakan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, menjaga kelestarian lingkungan hidup dari beban pencemaran, serta menambah diversifikasi tanaman dan bertambahnya areal hijau. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pengadaan mesin pencacah sampah sebanyak 3 unit dan pengolah kompos 3mx3m sebanyak 3, pengadaan tempat sampah sebanyak 644 buah tong sampah ukuran 55 x 30 cm, dan 500 buah tong sampah ukuran 40 x 30 cm, pembangunan los pengolahan sampah di TPA dan pemeliharaan 1 unit buldozer.
- (2) Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura tahun anggaran 2009, uji kualitas udara sebanyak 12 titik dan uji kualitas air sebanyak 40 titik, Pemantauan Pengelolaan LH oleh pelaku usaha di 45 lokasi, serta terlaksananya sosialisasi pengelolaan LH kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pengadaan peralatan pertamanan sebanyak 15 unit, penyaluran bibit jati kepada petani sebanyak 7.000 batang, bibit mangga sebanyak 1.000 batang.
- (4) Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Kabupaten, uji emisi kendaraan sebanyak 1 kali, sosialisasi reklamasi eks galian gol C sebanyak 3 kali, bantuan bibit akasia bagi masyarakat sebanyak 4440 batang dan bantuan pupuk kandang sebanyak 4400 Kg.

9. URUSAN PERTANAHAN

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 937.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp.541.403.875,- atau 57,75% diarahkan untuk penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan; dan memberikan kepastian hukum dan informasi pertanahan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pengadaan tanah menjadi aset Pemerintah Desa seluas 2600 m² di Desa Dokoro Kecamatan Wirosari.
- (2) Pensertifikatan tanah massal milik masyarakat melalui Proda sebanyak 250 bidang di Desa Jumo Kecamatan Kedungjati dan Desa Sumber Jati Pohon Kecamatan Grobogan, inventarisasi tanah eks. Bondo Desa pada 4 (empat) Kelurahan.
- (3) Program penyelesaian kasus sengketa tanah tukar menukar tanah kas desa dengan tanah milik perorangan sebanyak 10 kasus

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dialokasikan anggaran Rp. 4.352.207.500,- dan terealisasi Rp 4.054.496.263,- atau 93,16% diarahkan untuk menuju tertib administrasi kependudukan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pemeliharaan peralatan pelayanan KK dan KTP di 19 kecamatan.
- (2) Pelayanan dokumen kependudukan secara kolektif dan reguler berupa blangko KK sejumlah 176.000 set, blangko KTP sejumlah 425.000 keping serta pengadaan blangko administrasi mutasi penduduk sejumlah 25.000 set.
- (3) Penatausahaan data penduduk desa /kelurahan sekabupaten Grobogan meliputi 273 desa dan 7 kelurahan.
- (4) Sosialisasi akta kelahiran di 273 desa dan 7 kelurahan sekabupaten Grobogan serta pembinaan petugas pembantu pencatat perkawinan sejumlah 9 orang

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.620.115.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.516.232.086,- atau 93,59% diarahkan untuk penyusunan keserasian kebijakan di bidang perlindungan yang berbasis gender terhadap perempuan dan anak; strategi percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender; peningkatan sumber daya perempuan di bidang ekonomi melalui ketrampilan; serta peningkatan kesadaran kepada setiap sektor terkait agar lebih responsif dalam memprioritaskan permasalahan gender. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2006, dan UU No. 21 Tahun 2007 bagi 280 orang Kepala Desa / Kelurahan se-Kabupaten Grobogan, Pelatihan pada petugas pendata dan penyaji data pilah gender di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebanyak 67 petugas dan sosialisasi gender dan perlindungan anak bagi 400 warga binaan P2MBG di 2 desa lokasi P2MBG serta penyusunan buku data pilah gender di 2 desa lokasi P2MBG.

- (2) Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi 20 orang korban kekerasan dalam rumah tangga, pembentukan sanggar anak dan remaja di 7 Kecamatan sebanyak 140 orang serta terlaksananya pembekalan keterampilan pengolahan minuman / makanan dari bahan lokal.
- (3) Pembekalan Tim Pelayanan Terpadu KDRT bagi 150 orang tim penanganan kasus KDRT di 19 Kecamatan se-Kabupaten Grobogan dan pembentukan wadah untuk forum anak tingkat kabupaten sebanyak 76 orang dalam 1 wadah forum anak.
- (4) Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan keterampilan sebanyak 2 kelompok di 2 kecamatan, evaluasi pelaksanaan GSI di 19 Kecamatan se-Kabupaten Grobogan dan operasional penyaluran bantuan kesejahteraan kepada guru pra-diknas non PNS se-Kabupaten Grobogan sebanyak 1.355 guru.
- (5) Pelatihan teknik analisis gender bagi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sebanyak 210 PPTK, penyaluran bantuan biaya penunjang kegiatan kepada organisasi perempuan se-Kabupaten Grobogan sebanyak 111 organisasi, evaluasi sistem pengolahan dan penyajian data pilah gender dan evaluasi realisasi kegiatan PUG serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kasus-kasus KDRT di 280 desa/kelurahan pada 19 kecamatan

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dialokasikan anggaran Rp. 1.756.425.000,- dan terealisasi Rp. 1.677.012.000,- atau 95,48% diarahkan untuk meningkatkan peserta KB baru dan aktif; meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi; meningkatkan pencapaian peserta KB baru; peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR; meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya narkoba; meningkatkan kualitas keluarga; meningkatkan kegiatan kelompok bina keluarga, dan kelompok UPPKS; dan meningkatkan kegiatan operasional BKB Posyandu PADU. Realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pembinaan peserta KB baru dan KB aktif, penyediaan sarana dan prasarana untuk operasional Penyuluh KB (PLKB), pembuatan dan penggandaan modul Gema Sutra, Pembinaan PIK KRR sebanyak 150 orang di 3 wilayah kecamatan Kabupaten Grobogan (Penawangan, Tawangharjo, Godong).
- (2) Pelayanan kontrasepsi MOW/ P bagi 100 peserta, pengiriman obat, alkon dan non alkon kepada KKB di 19 kecamatan, Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah di 2 kecamatan.
- (3) Pelatihan ketrampilan bagi tenaga pendamping / PLKB / PKB dan kader kelompok UPPKS, pemutakhiran data penduduk miskin penerima Jamkesda Tahun 2009 dan peningkatan pengetahuan BTM produk kelompok UPPKS bagi kader UPPKS, serta Pelatihan kader kelompok

Bina Keluarga Balita (BKB) dan pembinaan kader PPKBD perwakilan kecamatan se Kabupaten Grobogan.

13. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan Urusan Sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp. 617.000.000,- dan terealisasi Rp. 568.253.571,- atau 92,10% diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan keluarga miskin; meningkatnya kemandirian para penyandang cacat; Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar; meningkatkan kemandirian panti asuhan; meningkatnya produktivitas eks PGOT dan eks. Napi serta WTS. Dengan realisasi kegiatan, antara lain :

- (1) Pengkajian penanganan PMKS di luar daerah, bimbingan dan ketrampilan penderita cacat kepada 20 penderita cacat.
- (2) Pengiriman siswa SD/MI ke PA Kartini Tawangmangu sebanyak 75 anak, pentas seni Penca dan Panti kepada 30 anak panti/cacat.
- (3) Pemberdayaan Panti Asuhan di 30 panti asuhan, pembinaan kepada 100 orang WTS/eks. NAPI/PGOT dan bantuan kepada 80 orang terlantar/kehabisan bekal.
- (4) Pelatihan penanggulangan bencana alam kepada 60 orang tagana

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 915.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 857.829.000,- atau 93,75%, diarahkan untuk penyediaan data yang akurat guna pengambilan kebijakan bagi pemerintah serta sebagai upaya pemerintah untuk untuk peningkatan kualitas sumber daya masyarakat; memberikan informasi kesempatan kerja bagi masyarakat, dan pemantauan bagi kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja; dan memberikan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Penyusunan data base ketenagakerjaan sebanyak 15 komponen, pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan berupa kursi, meja rias, tempat tidur facial, hair dryer, kursi keramas dan kaca rias, identifikasi ketenagakerjaan di 125 perusahaan, pelatihan kerja menjahit kepada 16 orang, pelatihan kerja komputer kepada 16 orang, pelatihan kerja salon kecantikan dan Bimtek CBT bagi 25 instruktur.
- (2) Penyebarluasan informasi bursa kerja kepada 500 orang, sosialisasi ketenagakerjaan, pelatihan tukang kayu, pelatihan pembuatan makanan ringan kepada 160 orang, pemantuan kinerja lembaga PPTKIS/Cabang PPTKIS sebanyak 33 PPTKIS/Cabang PPTKIS/2 BLKN dan 20 orang petugas lapangan.
- (3) Pelatihan penanggulangan kebakaran/evakuasi kepada 20 orang, sosialisasi norma ketenagakerjaan kepada 80 orang/perusahaan dan peningkatan kinerja Dewan Pengupahan sebanyak 100 orang

15. URUSAN KOPERASI DAN UKM

Penyelenggaran Urusan Koperasi dan UKM dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.167.775.000,- dan terealisasi Rp. 1.068.213.196,- atau 91,47% diarahkan untuk peningkatan iklim usaha KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang kondusif; pembangunan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif yang kondusif; peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM; dan peningkatan akses sumber daya produktif. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan KUMKM di 50 koperasi dan 10 LEPM, pembentukan 5 sentra / kelompok Usaha Mikro Kecil, fasilitasi Ijin SPP-IRT bagi 20 UMK dan 20 SIUP TDP, identifikasi usaha mikro kecil di 9 sektor usaha bagi 1000 UMK / 40 Desa / 10 Kecamatan dan pendampingan sertifikasi HAT bagi 120 UMK yang bersumber dari APBD TA. 2009.
- (2) Temu usaha dan pengembangan jaringan antar usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah maupun usaha lain bagi 40 KUMKM, keikutsertaan UKM pada promosi produk unggulan di Yogyakarta, temu kemitraan 50 petani tembakau dan penyaluran sarana prasarana produksi bagi anggota/calon anggota KSP/USP dan Bintek Wirausaha UMK masyarakat petani tembakau bagi 60 orang di 9 kecamatan.
- (3) Terlaksananya perkuatan modal kepada 2 kelompok usaha mikro kecil.
- (4) Revitaliasi kelembagaan bagi 30 koperasi, diklat manajemen dan akuntansi koperasi dan manajemen usaha mikro kecil bagi 50 peserta, penyusunan program dan sistem informasi melalui database penyebaran koperasi berdasarkan sebaran kecamatan dan kegiatan ekonomi, pengawasan koperasi secara berkala bagi 68 koperasi, monitoring dana bergulir dari APBN, APBD I, APBD II dan dana lainnya di 25 koperasi.

16. URUSAN PENANAMAN MODAL

Penyelenggaran Urusan Penanaman Modal dialokasikan anggaran Rp. 271.100.000,- dan terealisasi Rp. 259.870.318,- atau 95,86%, diarahkan untuk meningkatkan sarana promosi produk unggulan; dan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dengan Pengembangan Produk dan Unggulan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Program Aplikasi "Simpedal" guna meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi

17. URUSAN KEBUDAYAAN

Penyelenggaran Urusan Kebudayaan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 336.000.000,- dan terealisasi Rp. 332.472.500,- atau 98,95% diarahkan untuk melestarikan kelangsungan kesenian tradisional. Dengan realisasi kegiatan yaitu :

- (1) Terbinanya 25 kelompok organisasi kesenian tradisional
- (2) Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan penambahan 1 (satu) set gamelan cagar budaya
- (3) Pembinaan 6 (enam) kelompok/jenis kesenian tradisional, pemeliharaan museum lokal Kabupaten Grobogan seluas 72 m².
- (4) Pengiriman kelompok kesenian Gedruwon sebanyak 62 peserta untuk mengikuti Parade Seni Budaya Tingkat Propinsi Jawa Tengah, serta penyusunan data organisasi kesenian, seniman dan benda cagar budaya sebanyak 15 jenis data.

18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dialokasikan anggaran Rp. 2.196.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.131.347.540,- atau 97,03% diarahkan untuk memupuk dan melestarikan nilai nasionalisme/patriotisme di kalangan pemuda/pelajar, pengembangan serta pemasyarakatan olah raga prestasi, meningkatkan mutu sarana dan prasarana olah raga yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan capaian program kegiatan :

- (1) Penyusunan database potensi dan SDM bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, serta monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Tahun 2009.
- (2) Seleksi dan pengiriman 4 pemuda pelopor Tingkat Propinsi, 20 atlet Tri Lomba Juang Tingkat Propinsi, pelatihan ketrampilan pemuda dan pemberian sarana penunjang kelompok pemuda sebanyak 15 kelompok, pemilihan sekolah profil Wawasan Wiyata Mandala, seleksi dan pengiriman Tim Debat Bahasa Inggris siswa SLTA ke tingkat Karesidenan dan Propinsi.
- (3) pelatihan ketrampilan bagi 10 kelompok pemuda produktif, sosialisasi bahaya merokok, narkoba dan HIV/AIDS bagi pemuda, atlet, seniman dan Pramuwisata di 6 (enam) UPT Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 380 orang peserta dan seleksi dan pengiriman atlet-atlet pelajar SMP untuk 12 cabang olahraga dalam rangka mengikuti POPDA SMP Tingkat Karesidenan dan Provinsi.
- (4) Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR, Stadion dan Lapangan Tenis (Indoor), penyelenggaraan POPDA SMA di Tingkat Kabupaten dan pengiriman 46 atlet untuk mengikuti POPDA SMA Tingkat Provinsi serta pemberian bantuan sarana olahraga kepada masyarakat berupa 200 bola volley, 110 net volley, 200 bola sepak dan 14 net tenis lapangan.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.934.535.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.990.951.490,- atau 80,88% diarahkan untuk memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan tindak pidana kriminal;

mengembangkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan; memberdayakan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan; meningkatkan pendidikan politik masyarakat; serta penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Kegiatan Yustisi dan operasional PPNS, Penataan pasar pagi, pasar nglejok dan pasar burung Purwodadi, Pembekalan bagi 280 anggota Hansip/Linmas dalam rangka menghadapi Pileg dan Pilpres.
- (2) Sosialisasi cukai ilegal terhadap 180 anggota Hansip/Linmas.
- (3) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Wilayah bagi Kepala Desa, Kepala Kelurahan, LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Peningkatan Ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja sebanyak 115 orang, Pembinaan Bagi Pemilik/Pengelola Hotel, kafe, Restoran dan Swalayan bagi 80 peserta, Pembinaan Ketertiban Wilayah Perkotaan bagi RT/RW Kel. Purwodadi, Kel. Kuripan, Kel. Danyang, Kel. Kalongan.
- (4) Sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat bagi Tomas, Toga dan Toda Tingkat Desa se-Kabupaten, Pelatihan ketrampilan PAM Swakarsa sebanyak 45 orang anggota Hansip/Linmas kecamatan, simulasi penanggulangan bencana bagi anggota Satlak PBP, Unit Ops PBP, Ka. Satlinmas PBP, Tim SAR.
- (5) Pemantauan ke desa-desa rawan bencana dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam kepada masyarakat, pelatihan SAR bagi anggota SAR, anggota Satlinmas, pelatihan mitigasi bencana bagi Ka. Satlinmas, Pendidik/Pembina Pramuka dan anggota unit operasi PBP.

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSONALIA

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Personalia dialokasikan anggaran Rp. 70.036.414.980,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.185.979.794,- atau 88,79%, diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian. Dengan realisasi kegiatan antara lain:

- (1) Rapat Koordinasi Muspida Kab. Grobogan, Konfrensi Pers dan Pembuatan Pers Release, Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, tindak lanjut laporan hasil pengawasan pada Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah se Kabupaten Grobogan.
- (2) Fasilitasi dan penanganan serta penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, penyusunan 4 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah, sosialisasi peraturan tentang cukai kepada 144 orang.
- (3) Penyaluran bantuan paving dan aspal kepada desa/ kelurahan.

- (4) Tersusunnya LAKIP, buku pedoman standarisasi indek biaya, Tersusunnya kelembagaan, Tupoksi dan UTJ Badan Narkotika dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Daerah, 100 buku perbup dan draf Raperda Lakhar BNK, 1 lembaga berdasarkan Perbup.
- (5) Rapat koordinasi ekuinda, bantuan perkuatan modal kepada usaha UKM/pengusaha mikro dan lembaga pemberdayaan ekonomi desa, serta bantuan modal LPED sebanyak 6 Desa.
- (6) Koordinasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Grobogan, monitoring dan evaluasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, Pameran pembangunan, promosi produk UKM di Kabupaten Grobogan, dan koordinasi pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (7) Intensifikasi PBB, ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Pendataan Pajak Daerah.
- (8) Penetapan APBD, Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan.
- (9) Penyusunan APB Desa di 273 desa dan perubahannya dan pengisian kekosongan perangkat desa di 134 desa sebanyak 439 formasi jabatan.
- (10) Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2009, 194 orang pelamar umum, sebanyak 85 honorer, pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, sebanyak 88 PNS, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai, pembinaan dan pengembangan jabatan PNS, sebanyak 1.297 pejabat struktural dan fungsional, penempatan PNS sesuai SOTK, konversi NIP bagi PNS Kab. Grobogan, sebanyak 11.746 PNS.

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 357.574.000,- atau 79,46% diarahkan untuk penanganan daerah rawan pangan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Penyediaan kebutuhan makanan pokok/beras bagi masyarakat miskin, pembelian gabah petani untuk cadangan pangan sebanyak 82 ton, pemberdayaan Rumah Tangga Miskin di 6 desa dan 12 kelompok desa Mapan.
- (2) Fasilitasi penguatan modal lumbung, pelatihan administrasi pengelolaan lumbung sebanyak 13 lumbung, penyaluran Dana Pendampingan pembelian gabah petani dari APBD maupun APBD I sebanyak 9.566 ton.
- (3) Sosialisasi pemanfaatan bahan pangan lokal untuk konsumsi pangan dan pembentukan kebun gizi di 3 desa.

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan anggaran Rp. 8.932.112.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.889.830.007,- atau 99,53% diarahkan untuk memberdayakan masyarakat; meningkatkan

kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; mempercepat pembangunan desa; mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan realisasi kegiatan, antara lain :

- (1) Pemantauan/pembinaan desa penerima PNPM MD di 18 kecamatan, pembinaan pengendalian UED-SP, bimbingan teknis dan UP2K di 70 desa dan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengelola lumbung pangan masyarakat dan BKD di 55 desa/kelurahan.
- (2) Penunangan TMMD di 2 desa 2 kecamatan.
- (3) Pelatihan dalam bidang manajemen pemerintahan desa bagi sekretaris BPD se Kab. Grobogan sebanyak 273 orang, pengisian kekosongan perangkat desa.
- (4) Pembinaan kader P2MBG dengan modal ketrampilan bagi 100 orang di 2 desa.
- (5) Pemantauan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di 48 desa, penyediaan dana dana UEP dan SPP di 16 kecamatan, serta sosialisasi dan monitoring pemugaran perumahan penduduk miskin sebanyak 140 rumah di 20 desa.

23. URUSAN STATISTIK

Penyelenggaraan Urusan Statistik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.200.000.000,- atau 100% diarahkan untuk, menyajikan data dan informasi statistik yang dapat memberikan gambaran kondisi Kabupaten Grobogan. Dengan realisasi kegiatan : Penyusunan data-data Indikator Pembangunan Kab. Grobogan secara 'time series' sebanyak 8 paket terdiri dari : Grobogan Dalam Angka 50 expl, PDRB 30 expl, IGR 25 expl, IHBB 25 expl, Profil Ketenagakerjaan 20 expl, Buku Saku GDA 50 expl, KDA 80 expl, dan Laju Inflasi 20 expl.

24. URUSAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 390.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 344.331.000,- atau 88,29% diarahkan untuk pelayanan data bagi masyarakat/pengguna, cetak daftar gaji dan penyajian data kepegawaian; meningkatkan kinerja pengelola arsip. Dengan realisasi program kegiatan, antara lain :

- (1) Penyiapan ruang depo arsip yang steril, 2 ruang (923 m²).
- (2) Pameran kearsipan di museum Ronggowarsito, Bintek kearsipan UPTD Pertanian dan Peternakan.

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika dialokasikan anggaran Rp. 1.316.658.000,- dan terealisasi Rp. 1.093.081.150,- atau 83,02% diarahkan untuk peningkatan kelancaran komunikasi dan penyampaian informasi secara timbal balik antara pemerintah dengan

masyarakat serta para stakeholder bidang komunikasi; peningkatan kualitas SDM para pelaku bidang komunikasi dan informasi; sarana penyampaian informasi atas potensi daerah kepada khalayak luas melalui berbagai media massa; serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Penyediaan Jaringan Wireless LAN di 4 SKPD, website Grobogan, Program Aplikasi Administrasi Perkantoran di SKPD yang telah terhubung Jaringan Wireless LAN sebanyak 1 Paket Aplikasi.
- (2) Operasional Bakohumas, pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (Pembekalan Protokol) bagi 110 orang sebanyak 2 kali.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (Advetorial), pengadaan alat studio dan komunikasi reviter radio VHT.
- (4) Pembuatan Paket Siaran TV sebanyak 3 paket, Dialog interaktif, Sosialisasi Cukai Rokok, di Radio melalui 100 kali spot iklan.
- (5) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 12 bulan.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Penyelenggaran Urusan Perpustakaan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 494.177.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 458.135.800,- atau 92,71 % diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan anak sekolah melalui budaya baca, dengan capaian kegiatan terlaksananya pengadaan buku fiksi dan non fiksi beserta kelengkapannya pada Perpustakaan Umum Kabupaten dan perpustakaan Mobil keliling.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Guna melaksanakan 8 urusan pilihan, disediakan anggaran sebesar Rp.19.374.790.000,- terealisasi Rp. 18.106.958.198,- atau mencapai 93,46%. Adapun urusan pilihan yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. URUSAN PERTANIAN

Penyelenggaran Urusan Pertanian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.942.285.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.325.158.463,- atau 94,83% diarahkan antara lain untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan; penanganan daerah rawan pangan; Penggunaan pupuk alternatif (organik); penyediaan sarana prasarana usaha pertanian dan perkebunan; pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular; meningkatkan produksi peternakan; serta meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pelatihan petani kebun benih sebar tembakau, Prima Tani, koordinasi PUAP, pembinaan petani/kelompok/kelompok UPJA.
- (2) Promosi agribisnis, pengadaan dan penyaluran bantuan sarana dan prasarana perkebunan kelompoktani tembakau berupa pupuk ZA 4.000

kg, pupuk NPK 3.500 kg, handspayer 60 buah, regen 2.000 buah, sumur gali 20 unit dan pompa air 20 unit.

- (3) Sosialisasi budidaya tembakau rendah kadar nikotin di 8 kecamatan dengan jumlah peserta 480 orang, dan tersalurkannya bantuan gunting pangkas untuk petani tembakau sebanyak 390 buah serta terlaksananya uji kadar nikotin tembakau sebanyak 90 sampel.
- (4) Terlaksananya SL bawang merah dan SL hortikultura agribisnis tomat (2 Unit) dan pengembangan komoditas kacang panjang, bawang merah (2 Unit), tersalurkannya bantuan bibit jambu air Citra dan Delima, pengadaan tanaman hias, pemeliharaan green house dan pembinaan dan pelatihan tanaman hias.
- (5) Pelayanan Kesehatan Hewan, pembelian 400 lt desinfektan, pemeriksaan susu sebanyak 52 sampel susu, pembelian 2 paket reagen V.
- (6) Demplot UMMB sebanyak 2.000 blok dan pengadaan pakan konsentrat sapi potong sebanyak 6.000 kg dan Tersusunnya buku data peternakan dan perikanan sebanyak 30 buku.
- (7) Lomba ternak se- Kabupaten Grobogan sebanyak 1 kali, penyediaan sarana inseminasi buatan sapi potong berupa 3 buah kontainer portabel, 2 buah stall IB dan 4 buah protektor kontainer, pembuatan biogas sebanyak 10 unit dan pengadaan ternak sapi potong sebanyak 10 ekor.
- (8) Pembinaan, pendataan dan pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Grobogan, pengadaan alat pembuatan pupuk organik, infrastruktur JITUT, JIDES, irigasi air permukaan, infrastruktur irigasi tanah dangkal dan sumur resapan.
- (9) Pendampingan Revitalisasi pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) (Eks.2P.o.A), tersusunnya RDK dan RDCK pupuk bersubsidi se-Kab. Grobogan, normalisasi jaringan air Balai Benih Padi di Desa Kapung dan Desa Ngambakrejo Kec. Tanggunharjo, dan terehabnya lantai jemur Balai Benih Padi (1 Paket).
- (10) Tersusunnya Rencana Intensifikasi Pertanian, kajian Rekomendasi Pupuk.

2. URUSAN KEHUTANAN

Penyelenggaraan Urusan Kehutanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.182.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.101.804.835,- atau 93,19% diarahkan untuk mengurangi luasan lahan kritis. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pembinaan kelompok tani hutan se Kabupaten Grobogan, penyediaan bibit tanaman pendukung gerakan penghijauan lingkungan sebanyak 17.300 batang.
- (2) Pembinaan PHBM, pengadaan empon-empon 2.100 kg, bibit porang 3.300 kg, dan pupuk kandang 4.500 kg, pembuatan satu areal model aneka usaha kehutan, pengadaan bibit aneka usaha kehutanan yaitu :

bibit porang 1.000 kg, bibit mangga 1.000 kg, benih jagung hibrida 200 kg, bibit sukun 1.000 batang dan pupuk kandang 5.000 kg.

- (3) Pengadaan dan penyaluran bibit untuk kegiatan PHPCP bagi masyarakat petani di Desa Kemadohatur Kecamatan Tawangharjo yaitu bibit sukun 500 batang, bibit durian 500 batang, bibit rambutan 250 batang, bibit mangga 250 batang dan ajir 1.500 buah.
- (4) Pembangunan dam penahan sebanyak 2 unit di Desa Bandungsari Kecamatan Ngaringan, pembangunan embung air sebanyak 1 unit di Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo.
- (5) Konservasi tanah sebanyak 10.300 batang di Desa Godan Kec. Tawangharjo dan Desa Sembungharjo Kec. Pulokulon, pembuatan demplot uji coba di 32 lokasi kegiatan dan tersedianya sarana dan prasarana penyuluh kehutanan di 6 UPTD, serta pengadaan dan penyaluran serta penanaman bibit dalam rangka kegiatan Persediaan Produksi Bahan Baku Kayu Rakyat (P3B2KR) sebanyak 12.000 batang.

3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dialokasikan anggaran sebesar Rp. 261.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 216.914.300,- atau 82,87% diarahkan untuk penerangan jalan umum kota kecamatan serta untuk mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif; pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan meminimalkan angka kecelakaan kerja serta menertibkan pertambangan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Tersusunnya Rancangan Perda pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan.
- (2) Pemetaan kawasan pertambangan rakyat di Kecamatan Klambu sebanyak 3 lokasi.
- (3) Pengembangan ketenagalistrikan di Desa Gedangan Kecamatan Wirosari
- (4) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah di 19 Kecamatan dan Tersusunnya Rancangan Perda Pengelolaan Air Tanah.
- (5) Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg di 19 Kecamatan.

4. URUSAN PARIWISATA

Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dialokasikan anggaran sebesar Rp.530.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 437.011.500,- atau 82,46% diarahkan untuk pengembangan dan pemasaran obyek wisata serta kesenian daerah; peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana obyek wisata. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, anggaran tidak dicairkan dan kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan pada Tahun 2009 Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah tidak

menyelenggarakan Promosi Pariwisata, yang biasanya diadakan tiap tahun.

- (2) Pemilihan 16 Duta Wisata Kabupaten Grobogan Tahun 2009, pengiriman 35 orang duta seni tayub campursari ke TMII Jakarta, lomba keroncong dan campursari dengan peserta 20 group, terlaksananya keikutsertaan dalam pameran produk unggulan bidang pariwisata di Borobudur International Festival (BIF).
- (3) Terlaksananya pembangunan sarana air bersih di obyek wisata Bleduk Kuwu, 8 Kios dan pemasangan 3 unit listrik dan pengadaan 2 mobil ATV dan 3 buah ayunan.

5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 71.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.620.000,- atau 99,75% diarahkan untuk meningkatkan populasi dan produksi perikanan, serta meningkatkan pendapatan petani ikan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terlaksananya dan tersebarnya benih ikan sebanyak 36.000 ekor di perairan umum, pembinaan petani ikan air tawar sebanyak 20 orang, bantuan rehab 4 kolam ikan, pembelian benih 10.000 ekor dan pakan lele sebanyak 250 kg.
- (2) Pemeliharaan rutin 2 lokasi BBI yaitu BBI Karangasem dan BBI Karangrayung selama 1 tahun.
- (3) Pemantauan pemasaran hasil perikanan dan terlaksananya gerakan gemar makan ikan pada 750 siswa sekolah dasar sebanyak 1 kali.

6. URUSAN PERDAGANGAN

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 526.700.000,- dan terealisasi Rp. 438.444.420,- atau 83,24% diarahkan untuk menjalin informasi pasar dan jejaring pasar, promosi produk industri serta meningkatkan kontak dagang pelaku usaha; pembangunan pasar; meningkatkan kerjasama kemitraan dan penguatan kelembagaan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terjaminnya mutu barang dan/ jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/ jasa yang berlaku untuk melindungi konsumen sebanyak 21 swalayan, 300 toko, 10 pasar umum dan 20 pasar desa.
- (2) Terkendalinya fluktuasi harga BBM dan Gas di 10 agen Mitan, 200 pangkalan dan 16 SPBU.
- (3) Terlaksananya para pengusaha untuk melakukan ijin usaha perdagangan sebanyak 1.000 unit usaha dan terpenuhinya kuota pupuk di Kabupaten Grobogan pada 19 Kecamatan.

- (4) Terlaksananya operasi pasar/ pasar murah minyak goreng dan gula pasir di 6 eks. pembantu Bupati, penataan kelembagaan Dekranasda, pembangunan los dan MCK pasar Suru Kecamatan Geyer sebanyak 1 (satu) los dan 4 (empat) MCK.
- (5) Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan sebanyak 5 kelompok oleh Disperindagtamben, serta Terlaksananya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan sebanyak 3 kelompok oleh Dinas Koperasi UMKM.

7. URUSAN PERINDUSTRIAN

Penyelenggaraan Urusan Perindustrian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.888.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.631.069.080,- atau 93,37% diarahkan untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan aneka makanan; pembinaan industri kecil dan menengah; pembinaan teknologi industri; meningkatkan pengembangan infrastruktur kelembagaan sentra. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terlaksananya update potensi retribusi pasar daerah sebesar 29%, penebitan SKRD toko/kios radius 300 m di 15 pasar daerah dan pemantauan pasar daerah saat hari raya sebanyak 15 pasar daerah.
- (2) Terlaksananya pembinaan UPTD dan Pembantu UPTD Pasar Daerah sebanyak 7 orang kepala UPTD dan 15 orang pembantu UPTD selama 1 tahun dan pembinaan pedagang pasar daerah sebanyak 100 orang 10 kali.
- (3) Terlaksananya pelatihan aneka makanan olahan sebanyak 50 orang, pelatihan batik dan Pameran Produk Industri di Jakarta Internasional Ekspo.
- (4) Pelatihan pembuatan pupuk cair, penyuluhan Bahan Tambahan Makanan (BTM), pelatihan pengembangan design kemasan produk industri, pelatihan industri hasil hutan, pelatihan kerja (magang) di bidang garmen bagi IKM, pelatihan penerapan GMP produk rokok dan kemitraan industri rokokke Jember, pelatihan ketrampilan produksi rokok di desa Sambungharjo, Ngraji, Kalisari, Tanggungharjo, sugihmanik dan Karang Sari sebanyak 300 orang dan pelatihan teknologi industri bagi aparat Dinas sebanyak 6 orang, serta pembinaan dan fasilitasi merk rokok sebanyak 20 perusahaan.
- (5) Tersedianya bantuan peralatan produksi industri rokok sebanyak 60 unit alat pres rokok, 120 alat cetak/ pelinting rokok, 24 meja kerja rokok dan 48 kursi panjang dan tersedianya sarana promosi rokok daerah sebanyak 36 unit kereta promosi rokok.
- (6) Terlaksananya penguatan dan pengembangan infrastruktur sentra sebanyak 6 sentra dan pemutakiran data base bidang industri, perdagangan dan pertambangan sebanyak 100 buku.

8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Penyelenggaran Urusan Ketransmigrasian dialokasikan anggaran sebesar .971.125.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 884.935.600,- atau 91,12% diarahkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat transmigran; dan penyiapan SDM penduduk yang akan ikut transmigrasi. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terwujudnya kerjasama antar pemerintah kabupaten di bidang ketransmigrasian melalui 2 (dua) MOU di 4 lokasi penajakan, bantuan dan pengawalan untuk transmigran asal Kabupaten Grobogan sebanyak 88 KK dan tersedianya calon transmigran TU dan TSM sebanyak 50 KK.
- (2) Sosialisasi ketransmigrasian dalam perspektif kerjasama untuk 3 wilayah/90 orang, pembinaan dan pembekalan calon transmigrasi kepada 25 KK dan terlaksananya persiapan akhir pemberangkatan calon transmigran sebanyak 25 KK (100 orang).

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat meliputi 5 (lima) urusan, terdiri dari : Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Urusan Pertanian, dengan total anggaran sebesar Rp. 47.467.645.000,- dan terserap sebesar Rp. 45.782.543.600,- atau 96,45%. Dengan uraian sebagai berikut :

- 1) **Urusan Pekerjaan Umum**, menerima dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 3.357.199.000,- terealisasi sebesar 96%, digunakan untuk Pelatihan Desain Konstruksi, Pelaksanaan Rehabilitasi daerah irigasi dengan Metode Partisipatif, Pelaksanaan Desain Partisipatif, serta Operasional Workshop.
- 2) **Urusan Perumahan**, menerima dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 5.175.500.000,- terealisasi sebesar 99% yang digunakan untuk Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum, dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
- 3) **Urusan Ketenagakerjaan**, menerima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 4.400.000.000,- terealisasi sebesar 87% yang digunakan untuk Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
- 4) **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**, menerima dari Kementerian Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 27.009.125.000,- terealisasi sebesar

99,9% yang digunakan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

- 5) **Urusan Pertanian**, menerima dari Kementerian Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 7.616.530.000,- terealisasi sebesar 99% yang digunakan Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pengembangan Agribisnis.

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2009, hanya pada **Urusan Ketahanan Pangan**, dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- terealisasi 100% yang digunakan untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dana Stimulus Fiskal dan Dana Dekonsentrasi.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal Penegasan Batas Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan akan batas kewenangan wilayah administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk menghindari kemungkinan adanya konflik perbatasan, serta memudahkan dalam pemetaan pembangunan maupun pengembangan wilayah.

Disamping melakukan Penegasan Batas Daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain, melalui Forum Kedungsepur dan Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKSI).

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga.

Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan kerjasama dengan GT-Z dalam bidang Pengarusutamaan Gender, kerjasama dengan PLAN dalam pembentukan Forum Anak dan Sanggar Anak, serta kerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pembangunan Swadaya Perempuan (LPPSP) Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan anggaran responsif gender. Disamping itu, dalam pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan kerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli berupa pembangunan unit pengolahan sampah organik pasar untuk diolah menjadi pupuk kompos organik di Kota Purwodadi. Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik banyak pula dilakukan kerja sama dengan pihak penyedia jasa.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah dilakukan dalam upaya mencapai keterpaduan, keselarasan dan keharmonisan baik di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembinaan kemasyarakatan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya :

- 1) Terlaksananya kegiatan Bakoppar Tahun 2009 bagi Tomas, Toga, Toda dan Karang Taruna sebanyak 60 orang, Orientasi Wawasan Kebangsaan bagi Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan sebanyak 40 orang, Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi 50 Tomas, Toga dan Toda.
- 2) Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 bagi Toga dan masyarakat wilayah Kecamatan Gubug sebanyak 60 orang, orientasi ketahanan bangsa bagi 50 seniman dan budayawan, pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi 60 orang.
- 3) Terlaksananya sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/FKDM) pada 50 orang Tomas, Toga dan Toda Tingkat Desa se-Kabupaten, terlaksananya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD), sarasehan lintas Parpol, Tomas, Toga, dan LSM tingkat kecamatan sebanyak 50 orang,
- 4) Terlaksananya dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, dengan sosialisasi perundang-undangan bidang politik, terciptanya stabilitas politik yang mantap serta kondusif dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- 5) Terlaksananya pemantauan setiap tahap kegiatan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- 6) Terlaksananya pembekalan Jaring Komunikasi Pileg dan Pilpres bagi Kasi Trantib se-Kab. Grobogan dan Petugas entry data tingkat kecamatan sebanyak 50 orang.
- 7) Terselenggaranya Rapat Koordinasi Muspida dengan agenda membahas kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, stabilitas ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mantap, kerukunan antar umat beragama, budaya tertib hukum pada masyarakat, penanganan bencana alam dan patologi sosial di Kabupaten Grobogan dan Terkoordinasinya kegiatan untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

D. Pembinaan Batas Wilayah.

Secara demografi Kabupaten Grobogan berada di tengah 8 (delapan) Kabupaten tetangga. Di sebelah Barat dengan Kabupaten Semarang dan Demak, di sebelah Utara dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, di sebelah Timur dengan Kabupaten Blora dan di sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen dan Ngawi (Provinsi Jawa Timur).

Pada Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Grobogan melanjutkan kegiatan pembinaan batas wilayah, berupa pengurusan proses pengesahan Batas Daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten

Sragen, yang kegiatan Penegasan Batas Daerahnya memperoleh fasilitasi dari Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Grobogan termasuk daerah yang rawan bencana, diantaranya adalah banjir, angin taufan, tanah longsor, dan kekeringan. Daerah yang sering mengalami banjir yaitu bantaran sungai Lusi, Serang, Tuntang, KB 1 dan KB 15 di Kecamatan Tegowanu.

Sementara Angin Taufan terjadi di Kecamatan Tawangharjo, Kedungjati, Penawangan, Grobogan, Tegowanu, Gubug, Toroh, Tanggungharjo, Purwodadi, Ngaringan. Sedangkan Tanah Longsor terjadi di Kecamatan Kradenan, Purwodadi, Geyer, Brati dan Wirosari; dan Kekeringan pada musim kemarau melanda di belahan wilayah timur.

Dalam hal penanganan bencana di Kabupaten Grobogan, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap atau lebih dikenal dengan nama Siklus Bencana, yaitu:

- (1) **Pra Bencana.** Dilaksanakan peringatan dini kemungkinan terjadinya bencana, khususnya pada saat terjadinya pergantian musim; Pemberdayaan masyarakat tentang kemampuan mandiri dalam membaca karakteristik bencana dan antisipasi penanganannya; Pencegahan atau mitigasi bencana melalui penghijauan, pengerukan sedimentasi saluran, optimalisasi hamparan sungai dan tanggul.
- (2) **Saat Bencana.** Dilakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan tahapan: Pendirian tenda peleton yang difungsikan sebagai Posko, Dapur Umum, Komunikasi dan Administrasi serta PPPK disetiap penampungan; Bersama dengan unsur medis mengevakuasi korban yang perlu dibantu dengan rujukan kesehatan; Bersama dengan SKPD terakit mengupayakan kebutuhan-kebutuhan dasar para korban bencana; Pengamanan wilayah bencana yang ditinggal dalam pengungsian.
- (3) **Pasca Bencana.** Bersama dengan SKPD terkait mengadakan evaluasi, klasifikasi dalam laporan akibat bencana; Rehabilitasi dan pemulihan sarana prasarana umum/infrastruktur yang mengalami kerusakan melalui skala prioritas; Mengupayakan bantuan secara vertikal guna pembangunan infrastruktur yang tidak dapat diselesaikan oleh Kabupaten.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus.

Di Kabupaten Grobogan tidak terdapat kawasan khusus. Sementara yang ada adalah kawasan lindung sebagaimana diatur di dalam Perda No. 10 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW), yang meliputi :

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, terdiri kawasan yang mempunyai kelerengan diatas 40° seluas $\pm 448,50$ Ha di Kecamatan Grobogan, Brati, Tawangharjo dan Wirosari dan kawasan resapan air yang berada di 30 Desa pada 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanggungharjo, Kedungjati, Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus, Klambu dan Grobogan.

- (2) Kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sempadan sungai seluas ± 7.265 Ha, sempadan waduk (Gambrengan, Sanggeh, Butak, Simo, Nglangon, Kenteng) seluas 149 Ha dan sempadan mata air seluas ± 1.382 Ha.
- (3) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya seluas ± 206,43 Ha yang meliputi kawasan Bledug Kuwu, Mrapen, Makam Ki Ageng Selo, Makam Ki Ageng Tarub, Goa Lawa dan Goa Macan serta Goa Urang.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, telah dilakukan upaya-upaya yang kondusif dengan melaksanakan koordinasi yang efektif dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI serta masyarakat itu sendiri, disamping mengefektifkan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2005, membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

H. Hal lain-lain.

Beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Grobogan pada Tahun 2009, sebagai berikut :

- (1) Penghargaan Nasional sebagai Pelaksana Terbaik Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2009.
- (2) Penghargaan Nasional dalam bidang Keluarga Berencana, Manggala Karya Kencana bagi Bupati Grobogan.
- (3) Penghargaan Adipura untuk kategori Kota Kecil.
- (4) Penghargaan Presiden atas Peningkatan produksi padi lebih dari 5%.
- (5) Penghargaan sebagai Kabupaten Pro Gender Tahun 2009 oleh Lembaga Pengkajian Pembangunan Swadaya Perempuan (LPPSP) Jawa tengah.
- (6) Juara I tingkat Nasional, Lomba kelompok tani untuk komoditas padi, atas nama Poktan “Ngudi Luhur”, Ds. Kluwan, Kec. Penawangan.
- (7) Juara III tingkat Nasional, Lomba Petugas O & P Jaringan Irigasi Nasional.
- (8) Juara I tingkat Provinsi, Lomba Kelompok Tani untuk komoditas padi, atas nama Poktan “Ngudi Luhur”, Ds. Kluwan, Kec. Penawangan.
- (9) Juara II tingkat Provinsi, Lomba Kelompok Tani ternak ayam Buras, atas nama Kelompok Tani ternak Ayam Buras “ SAE “ Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari.
- (10) Juara II tingkat Provinsi, Lomba Bhayangkara KB Kesehatan.
- (11) Juara II tingkat Provinsi, Lomba UPPKS.
- (12) Juara II tingkat Provinsi, Lomba PPKBD.
- (13) Juara III tingkat Provinsi, PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja), atas nama PIK-KRR Tegar Mandiri.
- (14) Juara III tingkat Provinsi, Lomba Bina Keluarga Balita.
- (15) Juara I tingkat Provinsi, Kreatifitas Pembelajaran Guru Kelas Imersi Mata Pelajaran IPA, atas nama Drs. Supriantoro, Guru SMPN 1 Gubug.
- (16) Juara III tingkat Provinsi, Lomba Cipta Senam Ceria Anak Usia Dini, atas nama Hesti Giriandari, Tutor PAUD Klambu.

- (17) Serta prestasi para pelajar dalam bidang olah raga dan seni, yaitu Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN), POPDA, Pospeda Pondok Pesantren, dan Pekan Seni tingkat Provinsi.

VI. PENUTUP

Demikian paparan singkat mengenai aspek-aspek kebijakan program maupun implementasinya, baik yang menyangkut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pembinaan ketertiban umum dan pembinaan kemasyarakatan sesuai tugas dan wewenang kepala daerah.

Namun kami menyadari, bahwa dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat, serta menyelesaikan persoalan-persoalan daerah secara menyeluruh. Hal ini bukan karena kami tidak atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada, dan tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat.

Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui forum ini saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang. Demikian juga kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, dukungan dan kerjasamanya dengan baik selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan bathin kepada kita semua untuk terus membangun Kabupaten Grobogan yang kita cintai ini semakin maju, mandiri, makmur, dan sejahtera. Amin.

Purwodadi, 20 Maret 2010.

**BUPATI GROBOGAN**

H. BAMBANG PUDJIONO, SH